

# Refleksi

**JURNAL KAJIAN AGAMA DAN FILSAFAT**

**“Relasi Islam dan Kekuasaan: Pluralitas  
Tafsir atas Budaya dan Politik”**

## **WACANA**

**Sirojuddin Aly**

**Paradigma Pemilihan Kepala Negara di  
Zaman Khulafa Al-Rasyidin**

**Sukron Kamil**

**Pemikiran Politik Islam Klasik dan  
Pertengahan: Tinjauan terhadap Konsep  
Hubungan Agama dan Negara**

**Muhamad Ali**

**Understanding Muslim Plurality: Problems  
of Categorizing Muslims in Postcolonial  
Indonesia**

**H. Achmad Zainuri**

**Korupsi Berbasis Tradisi: Akar Kultural  
Penyimpangan Kekuasaan di Indonesia**

## **TULISAN LEPAS**

**Ahmad Tholabi Kharlie**

**Kodifikasi Hadis: Menelusuri Fase Penting  
Sejarah Hadis Nabawi**

# Refleksi

**Jurnal Kajian Agama dan Filsafat**



**Refleksi**  
**Jurnal Kajian Agama dan Filsafat**  
Vol. VII, No. 2, 2005

**Dewan Redaksi**

M. Quraish Shihab  
Said Agil H. Al-Munawwar  
Komaruddin Hidayat  
M. Din Syamsuddin  
Amsal Bakhtiar  
Kautsar Azhari Noer  
Hamdani Anwar  
Zainun Kamaluddin Fakhri

**Pemimpin Redaksi**

Edwin Syarif

**Anggota Redaksi**

A. Bakir Ihsan  
Wiwi Siti Sajarah

**Sekretariat**

Suzanti Ikhlās

**Penerbit**

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

**Alamat Redaksi**

Jl. Ir. H. Djuanda No. 95, Ciputat, 15412  
Telp. (021) 749 3677, 749 3579, 740 1925  
Fax. (021) 749 3677  
Email: [jurnalrefleksi@yahoo.com](mailto:jurnalrefleksi@yahoo.com)

**Refleksi** adalah jurnal yang terbit 3 (tiga) kali setahun, telah diakreditasi oleh Departemen Pendidikan Nasional RI melalui SK No. 39/DIKTI/Kep./2004. Refleksi menerima kontribusi tulisan berupa artikel, liputan akademik, laporan penelitian, dan tinjauan buku. Panjang tulisan minimal 10 halaman kuarto spasi ganda. Isi tulisan merupakan tanggung jawab penulis.

---

## TABLE OF CONTENTS

---

### *Editorial*

- ~ Relasi Islam dan Kekuasaan: Pluralitas Tafsir atas Budaya dan Politik Muslim

### *Articles*

- 127-146 Paradigma Pemilihan Kepala Negara di Zaman Khulafa Al-Rasyidin  
*Sirojuddin Aly*
- 147-166 Pemikiran Politik Islam Klasik dan Pertengahan: Tinjauan terhadap Konsep Hubungan Agama dan Negara  
*Sukron Kamil*
- 167-196 Understanding Muslim Plurality: Problems of Categorizing Muslims in Postcolonial Indonesia  
*Muhamad Ali*
- 197-210 Korupsi Berbasis Tradisi: Akar Kultural Penyimpangan Kekuasaan di Indonesia  
*H. Achmad Zainuri*
- 211-220 Hermeneutika Agama Islam: Menempatkan Relevansi Agama dan Kesalehan Sosial  
*Kusmana*
- 221-232 Islam dan Tata Masyarakat Dunia  
*Masri Mansoer*
- ### *Document*
- 233-258 Kodifikasi Hadis: Menelusuri Fase Penting Sejarah Hadis Nabawi  
*Ahmad Tholabi Kharlie*

## RELASI ISLAM DAN KEKUASAAN: PLURALITAS TAFSIR ATAS BUDAYA DAN POLITIK MUSLIM

**P**erkembangan reformasi telah menawarkan banyak ruang kebebasan, baik dalam wacana maupun praktik politik. Beragam khazanah intelektual dibongkar kembali untuk dipajang dalam etalase ekperimentasi kehidupan politik bangsa. Tak terkecuali khazanah dunia muslim yang secara historis telah memperlihatkan keintimannya dengan politik kekuasaan dengan rasa dan warnanya yang beragam. Sebagai sebuah wacana, ia berhak untuk ditafsirkan, diaktualisasikan, bahkan mungkin dibiarkan sebagai realitas masa lalu. Melihat transisi politik kebangsaan yang terus mencari bentuk dan di tengah wacana politik keagamaan yang sering melahirkan kesyahduan historis, maka kami berhasrat untuk menampilkan beragam wacana tersebut dalam bingkai pluralitas politik kekuasaan Islam. Pluralitas wacana merupakan medium untuk meletakkan perbedaan sebagai keindahan yang memberi sinergi untuk melahirkan yang terbaik di antara sekian wacana yang ada.

**Refleksi** kali ini menurunkan beberapa tulisan yang menawarkan wacana sosio-politik yang hadir dalam khazanah Islam sejak masa Khalafa al-Rasyidin, masa klasik dan pertengahan, serta realitas kontemporer yang terjadi di Indonesia.

Tulisan pertama disajikan oleh Sirojuddin Aly yang mengulas secara mendalam beberapa sistem pemilihan kepemimpinan yang berlangsung pada masa Khalafa al-Rasyidin. Menurutnya proses kepemimpinan dari empat khalifah (Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali) melahirkan paradigma yang berbeda. Pada masa Abu Bakar diterapkan sistem pemilihan langsung dan bebas, sementara kepemimpinan Umar dilakukan melalui pencalonan oleh pemimpin sebelumnya, yaitu Abu Bakar yang kemudian dipilih oleh rakyat. Sementara pada masa Utsman pemilihan dilangsungkan melalui panitia pemilihan yang dibentuk oleh Umar. Sedangkan kepemimpinan Ali diawali oleh pengakuan tokoh senior yang memiliki kharisma yang kemudian didukung oleh masyarakat. Proses pemilihan Ali

berlangsung dalam masa krisis karena adanya persaingan di kalangan sahabat pasca terbunuhnya Utsman.

Islam dan politik merupakan dua entitas yang unik karena keintimannya dalam merangkai kekuasaan dalam Islam. Hal ini terlihat dari wacana yang berkembang di kalangan pemikir politik muslim dalam melihat relasi agama dan negara. Sukron Kamil menelaah pemikiran politik Islam yang, menurutnya, sangat kaya atau bersifat *polyinterpretable*, sehingga sulit digeneralisir dengan mengecapnya sebagai otoriter atau demokratis. Sulit dipungkiri bahwa dalam sejarahnya Islam melahirkan beragam praktik politik kekuasaan, mulai yang otoriter sampai yang demokratis. Tulisan ini ingin melihat khazanah pemikiran politik Islam klasik dan pertengahan yang terkait dengan beberapa isu seperti hubungan agama dan negara, legitimasi otoritarianisme, bentuk pemerintahan teokrasi, demokrasi, dan aristokrasi, serta isu tentang masyarakat ideal. Dari pemaparan tersebut diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang konsepsi politik Islam yang berkembang pada masa tersebut relevansinya dengan saat ini.

Pluralitas wacana di dalam Islam mencerminkan adanya realitas yang beragam pula. Oleh karena itu perkembangan sosial budaya umat Islam akan ikut menentukan pergeseran kategorisasi yang sering dilakukan oleh para pengamat terhadap umat Islam. Muhammad Ali mencoba menelaah lebih jauh perdebatan yang meletakkan umat Islam Indonesia dalam kategorisasi-kategorisasi yang harus dikritisi karena adanya kemungkinan terjadinya konvergensi di antara kategorisasi tersebut. Sulit dipungkiri bahwa salah satu penemuan penting dalam menelaah sisi sosial umat Islam adalah kategorisasi kepercayaan dan perilaku orang Islam, yang membuktikan pluralitas Islam. Namun demikian, kategorisasi-kategorisasi —seperti santri-abangan-priayi, tradisional-modernis, politikal-kultural, fundamentalis-liberal, menurut Ali, harus disikapi secara kritis. Kategorisasi yang paling tepat adalah yang lebih dekat kepada kenyataan. Santri-abangan-priayi yang dikembangkan pada tahun 1960-an menunjukkan sentrisme Jawa dalam studi Islam Indonesia dan memperlihatkan suatu sistem tertutup yang statis, yang harus hati-hati ketika digunakan untuk menunjuk orang Islam di luar Jawa dan di masa sekarang. Perbedaan politikal-kultural juga sulit diterapkan dalam banyak kasus, seperti kasus ketika sebuah kelompok Islam terlibat dalam dua kegiatan politik dan kultural sekaligus.

Realitas sosial tidak selalu berjaln berkelindan dengan ajaran agama. Ajaran agung yang diwartakan oleh agama sering terhempas oleh kenyataan penyimpangan perilaku yang dipertontonkan oleh pemeluk agama, bahkan oleh tokoh agama itu sendiri. Inilah yang terlihat dari korupsi yang melanda negeri Indonesia, sebuah negara yang mayoritas penduduknya muslim. Korupsi di negeri ini merambah ke semua lini bagaikan gurita. Penyimpangan ini bukan saja merasuki kawasan yang sudah dipersepsi publik sebagai sarang korupsi. Tapi juga menyusuri lorong-lorong instansi yang tak terbayangkan sebelumnya bahwa di sana ada korupsi. Satu per satu skandal keuangan di berbagai instansi negara terbongkar. Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dipenuhi aktivis demokrasi, akademisi, dan guru besar, pun tak steril dari wabah korupsi. Di Departemen Agama (Depag), kasus korupsinya bahkan telah menyeret mantan orang nomor satunya sebagai tersangka. Tulisan Achmad Zainuri ini mencoba mengungkap akar tradisi dan kultural dari penyimpangan tersebut.

Perkembangan penafsiran terhadap sosial keagamaan lebih mengacu pada peran positif yang dimainkan oleh agama, walaupun sulit dipungkiri bahwa sebagian orang menganggap agama sebagai candu kemajuan. Figur-figur seperti Namrud, Firaun, Sigmund Freud, Karl Marx, Nietzsche, dan lain-lain, memandang peran agama secara sosio-politis menunjukkan fungsi yang justru menghalangi kemajuan masyarakat, mengancam kekuasaan dan sistem yang telah dibangun oleh elite agama, budaya, atau politik. Namun melihat perkembangan masyarakat kontemporer, agama seperti sebuah spirit yang banyak dipertaruhkan sebagai ideologi alternatif bagi kehidupan saat ini. Agama dianggap sebagai petunjuk bagi manusia menuju jalan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Itulah telaah Kusmana yang melihat peranan penting agama (Islam) bagi kehidupan manusia. Menurutnya, terdapat signifikansi yang kuat pesan Islam dari sisi rahmat dan kesalehan sosial.

Tata kehidupan dunia diwarnai oleh beragam ideologi. Masing-masing ideologi menawarkan masa depan yang paripurna. Sosialisme mengagungkan kolektivisme dan mengabaikan individualitas yang bertujuan akhir untuk pemenuhan kebutuhan yang bersifat material. Sebaliknya kapitalisme (liberalisme) menempatkan manusia sebagai individu yang bebas dan berhak menentukan sendiri hidupnya. Karena itu, boleh melakukan apa saja yang dipandang baik dan benar bagi kepentingan dan keuntungan dirinya. Dari kedua ideologi besar dunia tersebut, Islam tidak



menafikan atau menempatkan diri pada salah satu kutub tersebut. Islam hadir sebagai jalan tengah di antara ekstremitas beragam ideologi secara seimbang dan adil. Karena itu hubungan yang hendak dibangun oleh Islam adalah kemitraan dan kerja sama yang saling menguntungkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup seluruh anak manusia. Tulisan Masri Mansoer ini mengulas sisi universalitas Islam sebagai landasan yang paripurna untuk membangun tatanan masyarakat dunia.

**Refleksi** kali ini juga menurunkan tulisan yang mengulas perjalanan sejarah Hadis Nabawi yang panjang dan berliku. Perjalanan ini melahirkan kontroversi dan perseteruan wacana. Salah satu persoalan krusial yang kerap menjadi bahan perdebatan di pelbagai kalangan adalah menyangkut sejarah penulisan dan pembukuan Hadis. Bahkan, wacana (*discourse*) mengenai kodifikasi ini telah dijadikan senjata ampuh oleh orientalis dan para *inkar al-sunnah* (suatu kelompok yang menentang Sunnah) untuk mendiskreditkan Hadis atau Sunnah serta menggugat autentisitasnya sebagai sumber hukum Islam kedua, setelah al-Qur'an. Pertentangan di kalangan umat Islam, demikian halnya yang menjadi kritik para orientalis, berkuat pada persoalan keabsahan penulisan dan pembukuan Hadis jika dilihat dari aspek pertimbangan normatif, hingga akhirnya bermuara kepada keraguan terhadap otoritas Sunnah itu sendiri dalam sistem besar: Syariat Islam. Tulisan Ahmad Tholabi Kharlie ini berusaha memberikan klarifikasi awal terhadap pro-kontra seputar kodifikasi Hadis Nabi tersebut.

Rangkaian sajian tulisan dalam **Refleksi** kali ini merupakan ekspresi dari relasi ajaran langit dengan realitas historis yang tidak selalu berjaln berkelindan. Tentu, koneksitas antara ajaran langit dan realitas historis adalah harapan yang harus terus disuarakan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selamat membaca.

Jakarta, Agustus 2005

*Redaksi*

## **KORUPSI BERBASIS TRADISI: AKAR KULTURAL PENYIMPANGAN KEKUASAAN DI INDONESIA**

**Achmad Zainuri**

Kepala Biro Administrasi Umum & Kepegawaian UIN Syarif Hidayatullah  
Jakarta

**Abstract:** *Corruption in this country has spread to all sectors like an octopus. This deviation not only infiltrates areas that have been perceived by the public as nests of corruption but also delves into corridors of institutions that were previously unimaginable to have corruption. One by one, financial scandals in various state institutions have been uncovered. Even the General Election Commission (KPU), filled with democracy activists, academics, and professors, is not immune to the corruption epidemic. In the Department of Religion (Depag), corruption cases have even implicated its former top official as a suspect. This article attempts to uncover the roots of tradition and culture behind these deviations.*

**Keywords:** *Corruption; Culture; Tradition; Power; Deviation*

**Abstrak:** *Korupsi di negeri ini merambah ke semua lini bagaikan gurita. Penyimpangan ini bukan saja merasuki kawasan yang sudah dipersepsi publik sebagai sarang korupsi. Tapi juga menyusuri lorong-lorong instansi yang tak terbayangkan sebelumnya bahwa di sana ada korupsi. Satu per satu skandal keuangan di berbagai instansi negara terbongkar. Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dipenuhi aktivis demokrasi, akademisi, dan guru besar, pun tak steril dari wabah korupsi. Di Departemen Agama (Depag), kasus korupsi bahkan telah menyeret mantan orang nomor satunya sebagai tersangka. Tulisan ini mencoba mengungkap akar tradisi dan kultural dari penyimpangan tersebut.*

**Kata Kunci:** *Korupsi; Kultur; Tradisi; Kekuasaan; Penyimpangan.*

## **Pendahuluan**

Aspek yang penting digarisbawahi dalam kasus korupsi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Departemen Agama (Depag) adalah bahwa dugaan penyimpangan itu melibatkan berbagai kalangan. Korupsi di dunia modern ini memang harus dilakukan secara kolektif. Berjamaah. Kasus KPU membuka mata adanya keterkaitan pengusaha rekanan, auditor BPK, panitia anggaran, serta pengawas di DPR. Rekanan memberi setoran. KPU dan auditor BPK terindikasi terlibat transaksi suap. Oknum anggota DPR juga diduga menerima aliran dana yang dikumpulkan dari setoran rekanan KPU.

Kasus Depag juga mencengangkan publik. Banyak pihak terlibat mencicipi aliran penyimpangan Dana Abadi Umat (DAU). Diindikasikan ada yang mengalir ke oknum DPR, ormas keagamaan, serta auditor BPK. Departemen yang memikul identitas agama ternyata terjerembap juga pada perilaku yang justru dikecam oleh agama apa saja. Lebih tragis lagi, dugaan korupsi itu justru terjadi pada fungsi pelayanan yang terkait ibadah haji. Padahal banyak warga yang dengan susah payah, mengumpulkan dana bertahun-tahun, sen demi sen, atau menjual ladang dan hewan piaraan, demi menunaikan ibadah yang mereka idam-idamkan.

Daftar instansi baru yang dibobol koruptor, daftar tersangka baru, dan daftar modus baru penyalahgunaan kekuasaan, tampaknya akan terus bertambah. Korupsi benar-benar telah menjadi ancaman nyata bagi kelangsungan negeri ini. Bukan hanya terorisme, korupsi juga harus diperangi. Gara-gara korupsi, pasokan pajak dan pendapatan negara yang lainnya tidak optimal. APBN terus defisit. Karena pendapatan negara seret, maka kue APBN yang bisa dibagi juga terbatas. Anggaran pendidikan 20% yang diamanatkan UUD saja juga belum bisa terpenuhi. Sudah pendapatan

terbatas, pada tahap belanja pun masih dikorupsi pula. Sekali lagi, korupsi telah menjadi ancaman nyata bagi kelangsungan negeri ini.<sup>1</sup>

Kita dipaksa merenung, apa saja sejatinya faktor yang menyuburkan praktik korupsi? Apakah karena pemerintahan yang otoriter? Tapi nyatanya berbagai praktik korupsi di KPU, Depag, dan sejumlah DPRD yang dibongkar akhir-akhir ini malah terjadi pasca pemerintahan otoriter Soeharto? Pemerintahan otoriter bisa menjadi sebab. Tapi ternyata bukan satu-satunya sebab.

Apakah peraturan perundangan untuk memberantas korupsi belum memadai? Undang-undang (UU) tentang pemberantasan korupsi telah diperbaharui dua kali: tahun 1999 dan 2001. UU ini pula yang kini dipakai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Timtas Tipikor (Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) untuk secara efektif membongkar berbagai kasus korupsi. Tapi nyatanya, korupsi di KPU dan Depag, untuk menyebut dua contoh saja, ternyata berlangsung justru setelah dua UU itu ada. Mengapa pemerintahan SBY mampu lebih terbuka dan progresif memayungi pemberantasan korupsi? Mengapa pemerintahan Megawati dan Abdurrahman Wahid tidak optimal memberantas korupsi? Padahal perangkat perundangannya relatif sama.

Dari semua pertanyaan itu, kita dibawa pada sebuah penandasan bahwa ada faktor lain yang penting ditelaah di balik merebaknya kasus korupsi. Yakni faktor manusia. *The man behind the gun*, demikian ungkapan dalam bahasa Inggris, adalah juga faktor penting. UU hanyalah teks mati, sekadar warna huruf hitam di atas kertas putih, bila tidak ada manusia yang mematumhinya dan tidak ada aparat yang menegakkannya. Memang, faktor manusia bukan satu-satunya faktor. Ada proses yang kompleks dan saling terkait yang melibatkan berbagai faktor. Tetapi tak bisa dipungkiri, unsur manusia yang menjadi subjek hukum tak bisa dipandang sebelah mata. Manusalah yang membuat UU, etika, fatsun, dan norma menjadi operasional dan bermakna.

Dalam artikel ini, faktor manusia hendak ditelaah lebih dalam. Apakah tradisi, cara pandang, dan mentalitas manusia turut menyumbang suburnya praktik korupsi? Apakah kultur manusia juga menyebabkan tumpulnya proses penegakan hukum atas kasus korupsi? Apakah mentalitas ini hanya bersifat perorangan atautkah sudah kolosal sehingga membentuk tradisi, kebiasaan, dan bahkan kultural masyarakat?<sup>2</sup>

Ini penting dikupas secara mendasar karena secara acak kita sering menemukan sikap kolektif masyarakat yang secara tidak langsung bisa mendorong penyimpangan keuangan negara. Misalnya, ada anggapan lumrah di masyarakat bahwa bila seorang pejabat berkunjung ke sebuah daerah maka ia harus membawa dana bantuan besar. Bila tidak membawa sumbangan, pejabat itu dinilai pelit. Sejumlah organisasi kemasyarakatan bila hendak menggelar kegiatan, sering-kali harus audiensi dengan pejabat, lokal maupun nasional, untuk minta bantuan. Pejabat itu pun harus memutar otak untuk bisa membantu. Kalau tidak, popularitasnya bisa menurun. Kultur tuntutan publik semacam ini bisa mendorong seorang pejabat untuk korup.

### **Manusia Indonesia**

Karakter manusia Indonesia sudah beberapa kali dikupas dan diulas berbagai pakar. Hal itu sebagai upaya menggali akar persoalan dari situasi Indonesia. Kondisi bangsa yang diwarnai maraknya praktik korupsi juga dicoba digali pangkalnya dalam karakter dan kultur masyarakat Indonesia.

Mochtar Lubis, budayawan dan wartawan senior, pernah menyampaikan ceramah bertemakan “Kondisi dan Situasi Manusia Indonesia Kini” pada pertengahan 1970-an, yang kemudian menyulut polemik kebudayaan secara luas. Ceramah itu disampaikan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, persisnya 6 April 1977. Harian Kompas menyajikan ringkasan ceramah itu. Perdebatan kemudian mencuat di koran tersebut.<sup>3</sup>

Mochtar, dengan gaya khasnya yang blak-blakan, terbuka, dan terkadang membuat kuping merah, memaparkan hasil pengamatannya tentang ciri-ciri manusia Indonesia. Mochtar menyebutkan, paling tidak enam ciri. Sebagian besar merupakan ciri buruk. Pertama, hipokrit alias munafik. Suka berpura-pura, lain di muka, lain di belakang. Sikap munafik ini, kata Mochtar, memungkinkan korupsi berlangsung begitu hebat dan terus menerus belasan tahun di Pertamina, ketika itu. Karakter ini juga melahirkan sikap ABS (Asal Bapak Senang).

Kedua, enggan bertanggung jawab atas keputusannya. Bila disalahkan, manusia Indonesia suka mengatakan, “Bukan saya.” Seorang atasan akan melemparkan kesalahan pada bawahan. Sementara bawahan bila disalahkan, akan berkelit, “Saya hanya menjalankan perintah atasan.” Sikap ini masih terlihat pada kasus korupsi KPU saat ini. Ketua KPU menimpakan kesalahan pada sekretariat jenderal. Pihak sekretariat berdalih hanya

menjalankan perintah Ketua. Demikian pula di Depag. Mantan Menag mengaku dipermainkan oleh mantan Dirjen Hajinya. Sedangkan sang Dirjen melempar balik dengan beralasan, “Saya hanya menjalankan instruksi menteri”.<sup>4</sup>

Ketiga, berjiwa feodal. Keempat, percaya takhayul. Kelima, artistik. Ini satu-satunya ciri positif yang disebutkan Mochtar. Ciri ini, bagi Mochtar, paling memesonakan dan merupakan tumpuan harapan hari depan manusia Indonesia. Maraknya kompetisi bakat seni yang belakangan ini marak, seperti pentas AFI (Akademi Fantasi Indosiar), Indonesian Idol, atau Puteri Indonesia, dan sebagainya, tampaknya menguatkan prediksi Mochtar.

Keenam, berwatak lemah. Kurang kuat mempertahankan keyakinan. Mudah goyah bila ditekan mengubah keyakinan. Dalam konteks ini, Mochtar mengkritik fenomena pelacuran intelektual. Ketika Presiden Soekarno menanyakan bahwa inflasi itu baik demi revolusi Indonesia, para pakar ekonomi justru bertepuk tangan menyanjung pemikiran brilian pemimpin besar revolusi itu.

Selain enam ciri itu, Mochtar masih menambahkan beberapa ciri lain. Seperti tidak hemat dan cenderung boros. Tidak suka bekerja keras. Ingin seketika menjadi kaya tanpa kerja keras. Lebih baik memilih jadi pegawai negeri ketimbang pengusaha swasta. Manusia Indonesia juga suka cemburu dan benci melihat orang lain yang lebih maju. Dalam kategori “ciri lain” ini, manusia Indonesia juga suka humor, cepat belajar, dan kesabaran tinggi.

Orasi kebudayaan Mochtar mendapat tanggapan berbagai kalangan. Antara lain dari Sarlito Wirawan (psikolog UI), Margono Djojohadikusumo (ayah begawan ekonomi Soemitro Djojohadikusumo), Wil dan Yatim, dan Dr. Abu Hanifah. Sarlito<sup>5</sup> menilai orasi Mochtar memang tajam dan berani, namun kesimpulan yang disampaikan umumnya hasil dari kesan subjektif dan tidak ada data yang diperoleh dari penelitian ilmiah. Sehingga tidak didapat gambaran, ciri-ciri itu menggambarkan berapa persen penduduk Indonesia. Sarlito juga menjumpai beberapa kontradiksi: satu Sisi ingin cepat saya, sisi lain sabar.

Adapun Margono menyoal kecenderungan Mochtar untuk generalisasi. Seolah-olah semua manusia Indonesia hipokrit, munafik, malas bekerja, tidak bertanggung jawab, dan berwatak lemah. Margono sempat mencuplik surat cucunya, Prabowo Subiyanto,<sup>6</sup> yang saat itu sedang berjuang di Timtim untuk merebut “setiap jengkal tanah dengan taruhan

nyawa demi patriotisme dan cinta tanah air. Surat itu disampaikan saat keluarga Margono tengah bercengkerama dengan suka cita menikmati hidangan lebaran. Margono ingin menunjukkan, bahwa masih banyak warga Indonesia yang bekerja keras dan rela mempertaruhkan nyawa demi negara.<sup>7</sup>

Dalam jawabannya, Mochtar menjelaskan, tidak bermaksud melakukan generalisasi. Juga tidak bermaksud membangun pesimisme akan masa depan Indonesia. Ungkapan Mochtar yang bernada pedas itu sejatinya hanya ekspresi kejengkelan pada merajalelanya karakter yang tidak mendorong kemajuan itu. Mochtar berkali-kali mencontohkan kasus korupsi di Pertamina yang meski berjalan bertahun-tahun namun tidak diproses secara hukum. Korupsi Pertamina memang menjadi keprihatinan mendalam Mochtar. Bahkan korannya, *Indonesia Raya*, sampai dibredel pemerintah karena terlalu pedas mengkritik korupsi Pertamina.

Demi perbaikan bangsa, sebenarnya tidak terlalu penting mempersoalkan apakah ulasan Mochtar Lubis itu bernada generalisasi atau tidak. Yang terpenting, apalagi dalam suasana reformasi dan pembentukan *clean governance* lewat pemberantasan korupsi saat ini, adalah bagaimana kita menjadikan paparan Mochtar Lubis itu sebagai bahan introspeksi. Memang tidak semuanya benar, tapi tidak semuanya salah. Tidak semua manusia Indonesia bermental munafik, malas, feodal, dan tak bertanggung jawab. Tapi, ada juga yang bermental seperti itu. Meskipun populasinya tidak besar, tapi kalau mentalitas semacam itu menghinggapi segelintir elite pejabat negara yang menduduki pos-pos strategis, maka dampak buruknya jauh lebih serius. Meskipun berada di tengah mayoritas rakyat yang saleh dan berkarakter baik. Pemetaan karakter seperti itu penting bagi penegak hukum sebagai pedoman untuk membaca realitas.

### **Mentalitas Tiga Zaman**

Kajian tentang karakter masyarakat Indonesia sebenarnya bukan baru pertama kali diungkapkan Mochtar Lubis. Pada akhir 1960-an, Koentjaraningrat, antropolog UI, juga mengkaji hal yang sama. Ia menulis buku berjudul, “Rintangan-Rintangan Mental Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia”.<sup>8</sup> Koentjaraningrat menganalisis mentalitas bangsa Indonesia secara lebih sistematis, dengan argumen lebih akademik, ketimbang ceramah Mochtar Lubis.

Koentjaraningrat menganalisis dengan membagi tiga fase zaman sejarah Indonesia. Pertama, fase petani, yang ia sebut sebagai fase karakter asli bangsa Indonesia sebelum kedatangan kolonial. Kedua, fase pegawai atau priayi, yakni ketika Indonesia dijajah Belanda. Karena banyak priayi dan bangsawan Indonesia yang direkrut menjadi pegawai birokrasi kolonial. Ketiga, fase dekolonisasi, periode pasca Perang Dunia II. Koentjaraningrat membaca mentalitas bangsa Indonesia pada ketiga zaman itu dengan mengacu kerangka yang dibikin antropolog F.R. Kluckhohn dan sosiolog F.L. Strodbeck,<sup>9</sup> mengenai lima masalah hidup yang menentukan orientasi nilai budaya manusia. Berikut ini kerangkanya:

Masalah Hidup	Orientasi Nilai Budaya		
	Hidup itu buruk	Hidup itu baik	Hidup itu buruk tetapi harus diperbaiki
Hakikat dan sifat Hidup	Hidup itu buruk	Hidup itu baik	Hidup itu buruk tetapi harus diperbaiki
Hakikat Karya	Karya untuk hidup	Karya untuk kedudukan	Karya untuk Menambah Karya
Hakikat kedudukan manusia dalam ruang dan waktu	Masa lalu	Masa kini	Masa depan
Hakikat hubungan manusia dan alam	Tunduk terhadap alam	Mencari keselarasan dengan alam	Menguasai alam
Hakikat hubungan manusia dan manusia	Memandang ke tokoh atasan	Mementingkan rasa ketergantungan kepada sesamanya (berjiwa gotong royong)	Mementingkan rasa tak tergantung kepada sesamanya (berjiwa individualis)

Tabel di atas menjelaskan tentang peta kebudayaan dunia dalam mengonsepsikan lima masalah universal. Dalam menyikapi hakikat dan sifat hidup, ada tiga model orientasi nilai budaya: bahwa hidup itu buruk, hidup itu baik, dan hidup itu buruk tetapi harus diperbaiki. Sementara dalam menghayati hakikat karya, ada kebudayaan yang mengorientasikannya untuk hidup, untuk kedudukan, dan ada yang untuk menambah karya. Begitu pula tentang tiga masalah lainnya yang bisa dilihat pada tabel di atas.

Paparan Koentjaraningrat tentang beberapa ciri mentalitas masyarakat Indonesia, memberikan wawasan baru bahwa perilaku korup yang mewabah di kalangan masyarakat kita, khususnya kalangan birokrat dan pejabat, ternyata memiliki akar sejak masa kolonial. Yakni berakar pada apa yang disebut Koentjaraningrat sebagai mentalitas buruk priayi atau mental pegawai. Birokrat dan pejabat kita saat ini tampaknya lebih banyak meneruskan mentalitas priayi yang pada masa kolonial bertindak sebagai pegawai di pemerintahan penjajah Belanda.



Pada masa kolonial, masyarakat nusantara yang non-petani, sebagian besar bekerja sebagai pegawai pemerintah Belanda. Bahkan kalangan bangsawan, keluarga kerajaan, yang sebelum zaman kolonial tergolong sebagai penguasa yang dihormati, namun pada masa kolonial mereka hakikatnya juga bertindak sebagai pegawai penjajah. Mereka inilah yang dinamakan priayi.

Koentjaraningrat menganalisis mentalitas priayi ini dengan menggunakan kerangka sistematika Kluckhohn di atas. Mulai hakikat dan sifat hidup, hakikat karya, hakikat kedudukan manusia dalam ruang dan waktu, hakikat hubungan manusia dan alam, dan hakikat hubungan manusia dan manusia. Kita tidak akan menguraikan semua. Akan kita pilih pada mentalitas yang memiliki kaitan langsung dengan suburnya praktik korupsi.

Mentalitas pertama yang berkaitan langsung dengan korupsi adalah mentalitas yang terkait dengan hakikat karya. Koentjaraningrat menilai mentalitas priayi Indonesia menganggap hakikat karya manusia adalah untuk mencapai kedudukan berikut lambang-lambangnyanya. Mereka lebih mementingkan membangun simbol-simbol gengsi sosial, seperti membuat rumah mewah, perhiasan mencolok, gelar haji atau gelar keserjanaan. Tapi tidak memiliki orientasi pada karya produktif dan kreatif.

Dalam membangun rumah, misalnya, priayi Jawa lebih mengutamakan memperbaiki bagian depan rumah atau mempercantik pendapa rumah, meski kamar mandinya rusak, berlumut, dan jorok, atau dapurnya hampir ambruk. Karena pendapa adalah bagian yang paling mudah dipamerkan kepada orang luar dan karena itu harus melambangkan gengsi dan kedudukan sang pemilik rumah. Mereka lebih mengedepankan kosmetik ketimbang isi. Dalam pengelolaan negara, mentalitas ini mewujudkan dalam bentuk kebijakan yang lebih mengedepankan pembangunan gedung bertingkat, patung, museum, hotel berbintang, dan proyek mercusuar, ketimbang membereskan kampung kumuh, got mampat, dan jalanan yang rawan banjir.

Orientasi karya yang bertujuan untuk mencapai kedudukan juga berpengaruh pada pola perasaan tentang kesalahan. Bila ia berbuat salah, asal tidak ketahuan, lebih khusus lagi, asal tidak ketahuan atasannya, dan karenanya, asal tidak kehilangan muka, sehingga tidak menggoyahkan kedudukannya, maka jiwanya tidak terganggu oleh perasaan menyesal. Kebalikan dari karakter ini adalah mereka yang ketika berbuat salah, meski

tak ketahuan atasan, ia didera perasaan menyesal yang sampai mengganggu keseimbangan jiwanya.

Ruth Benedict (1946)<sup>10</sup> dan F.K.L. Hsu (1949)<sup>11</sup> mengistilahkan tipe pertama sebagai *shame culture* (budaya malu) dan yang kedua sebagai *guilt culture* (budaya bersalah). Dalam kebudayaan Jepang, misalnya, hilang muka karena kesalahan disikapi sedemikian serius, sehingga tiada jalan lain kecuali bunuh diri atau *harakiri*. Dalam kebudayaan Barat, yang tidak terpengaruh oleh karakter kebangsawanan, ciri-ciri *guilt culture* lebih menonjol. Dalam budaya ini, meski kesalahan yang ia lakukan tak diketahui orang lain, tak diketahui atasannya, toh ia akan terus terganggu oleh perasaan bersalah yang mendalam, sehingga mengakibatkan penyakit jiwa.

Menurut Koentjaraningrat, mentalitas bangsa Indonesia pada umumnya menganut *shame culture*. Mentalitas priayi pada dasarnya adalah mentalitas pegawai. Mereka menganggap sebuah kesalahan sebagai hal serius bila ketahuan atasan. Hal itu bisa membuatnya kelabakan, dan akhirnya mengalami apa yang dialami oleh penganut *guilt culture*, yakni sakit jiwa. Bila kesalahan itu sekadar ketahuan orang lain, menurut Koentjaraningrat, ia akan kehilangan muka, tapi hanya sementara. Karena ia sudah luntur nilai kebangsawanannya, ia tak akan bunuh diri.

Ia akan menunggu sampai orang mulai lupa pada masalahnya, maka ia akan “memasang muka” kembali. Malah, kadang-kadang sebelum orang lupa, ia mulai “nampang” kembali. Suatu bangsa yang menganggap remeh sebuah kesalahan, kata Koentjaraningrat, tidak akan dapat maju dengan pesat, karena mereka tidak akan belajar dari kesalahan.

Ulasan ini terasa relevan dengan kelakuan para pejabat kita akhir-akhir ini. Misalnya, ketika Akbar Tanjung telah divonis bersalah oleh PN Jakpus, masyarakat mendesaknya agar mundur dari posisi Ketua DPR. Tapi Akbar tanpa merasa malu, mengabaikan tuntutan itu. Di tengah perkaranya yang masih ditangani MA, Akbar bahkan juga tak malu maju dalam konvensi partai Golkar untuk menjadi calon presiden, meski kemudian kalah. MA kemudian memang secara kontroversial membebaskannya.

Begitu pula dengan Ginandjar Kartasmita yang perkaranya sedang ditangani kejaksaan, lalu di-SP3, lalu kini mau diungkap lagi. Ia dengan percaya diri maju ke bursa DPD dan kemudian merebut posisi Ketua DPD. Dalam momentum Pilkada dan Pemilu, banyak sekali kepala dae-

rah dan anggota DPRD yang periode sebelumnya telah dinyatakan ter-sangka korupsi, bahkan terpidana korupsi, namun masih tanpa malu maju kembali ke pemilihan calon kepala daerah dan DPRD. Sebagian mereka memang terpilih kembali. Mungkin, memori masyarakat kita tentang *track record* (rekam jejak) seorang tokoh memang pendek. Cepat lupa.

Mentalitas kedua, yang terkait dengan korupsi, adalah mentalitas dalam memaknai hakikat hubungan manusia dengan sesamanya. Mental priayi berpandangan bahwa segala tindakan harus diarahkan untuk pelayanan dan penghormatan pada atasan, senior, dan pemimpin. Seorang bawahan akan merasa mulia bila mampu memberi pelayanan terbaik pada atasan, dan pada tahap tertentu, adalah kebanggaan bila bawahan memberi Cendra-mata bingkisan kepada atasan.

Bagi Koentjaraningrat, mentalitas ini di Indonesia telah mendorong praktik korupsi. Mula-mula orang hanya menjalankan tradisi lama bahwa bawahan harus memberikan bingkisan kepada atasannya untuk menjaga hubungan baik. Dalam sistem administrasi modern, di mana hak dan kewajiban atasan dan bawahan telah dirumuskan, maka praktik demikian tak dibenarkan lagi. Karena masuk kategori suap. Di Indonesia, bawahan masih banyak yang disuruh mengerjakan urusan pribadi, istri, dan keluarga atasan. Dalam sistem modern, semua itu kategori korupsi. Pola hubungan atasan dan bawahan yang demikian itu juga berperan mempercepat rambatan korupsi, sehingga korupsi cenderung menjadi kerja kolektif. berjamaah. Bila atasan korup, maka tak apa bila bawahan juga korup.

Itulah dua contoh karakter fase priayi (masa kolonial) yang berdampak langsung pada perilaku korup. Pasca kemerdekaan, Koentjaraningrat mengidentifikasi lima macam karakter bangsa Indonesia. Pertama, meremehkan arti kualitas. Kedua, ingin mencapai tujuan dengan cepat dan tak mau berusaha selangkah demi selangkah. Ketiga, sering menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab. Keempat, sering tak percaya pada diri sendiri. Kelima, apatis dan lesu.

Sikap pertama, tak sadar akan arti kualitas, telah berakar sejak zaman petani dan zaman pegawai. Mentalitas yang punya pengaruh langsung pada korupsi adalah mental kedua, yaitu keinginan mencapai tujuan secepatnya dan tak mau berusaha selangkah demi selangkah. Mental kedua ini disebut juga “mentalitas menerobos” atau “mentalitas jalan pintas”. Mental ini hakikatnya juga disebabkan oleh mentalitas pertama: tak menghargai kualitas karya. Bisa juga sebaliknya, mental “tak menyadari

pentingnya kualitas” disebabkan oleh “mentalitas menerobos”. Yang pasti, keduanya saling mempengaruhi. Mentalitas ini sebenarnya tidak khas Indonesia, juga terdapat di negara lain, namun di negara lain kurang menonjol karena bisa diredam dengan mekanisme hukum atau kuatnya norma yang memaksa.

Akar penyebab mentalitas menerobos ini adalah, dalam istilah sosiologi, “*generation gap*”. Misalnya, karena kosongnya pos-pos puncak sepeninggal Belanda, maka banyak orang Indonesia yang mengalami promosi prematur. Lalu orang berpikir, kalau teman seangkatannya bisa menduduki posisi itu dengan cepat, maka dia semestinya juga bisa. Mekanisme lompat-lompat ini pada sisi lain, juga membawa kemerosotan kualitas kompetensi seseorang. Ada inflasi kompetensi. Seorang yang belum waktunya menjadi menteri melonjak jadi menteri, biasanya tak disertai kesiapan mental yang matang.

Ketiga, sikap tidak bertanggung jawab. Sikap ini juga berakar dari sikap pada fase sebelumnya, yakni sikap yang bekerja dengan orientasi memuaskan atasan. Ia tidak bekerja untuk kualitas karya, tapi ABS alias “Asal Bapak Senang”. Karakter ini juga disinggung Mochtar Lubis. Kalau ada pengawasan ketat, ia bekerja keras, kalau tidak, ya tidak. Ini paralel dengan gejala menurunnya tingkat disiplin. Sikap tak bertanggung jawab juga disebabkan karena kurangnya pendidikan dan kematangan watak. Ini juga berakar dari mentalitas cara menyikapi kesalahan.

## Penutup

Meskipun analisis Mochtar Lubis dan Koentjaraningrat di atas muncul empat dasawarsa silam, namun sebagian masih relevan dipakai membaca peta kultural masyarakat Indonesia saat ini. Mentalitas jalan pintas, “Asal Bapak Senang”, suka menyuap, bangga pada simbol kemewahan, dan sebagainya, rasanya masih belum lenyap dari masyarakat kita saat ini. Padahal karakter itu telah berurat akar pada mental buruk priayi masa kolonial, sekian abad lampau.

Agenda pemberantasan korupsi, selain dengan menempuh jalan penegakan hukum secara *fair*, juga perlu membereskan mentalitas buruk tadi. Dalam kaitan mental, mekanisme hukum memang berguna untuk meredam improvisasi mental buruk. Tapi sistem hukum hanya menyentuh permukaan. Bila instrumen hukum gagal mengendus, maka perilaku

korup akan tetap bergerak secara kucing-kucingan. Akan lebih komprehensif, kalau solusi permukaan dengan jalur hukum dilengkapi dengan solusi mental untuk perbaikan dari dalam jiwa manusia. Sehingga semangat perbaikan itu betul-betul lahir dari kesadaran yang mendalam.

Dewasa ini, berkembang *training-training leadership* dan manajerial yang berbasis pada spiritualitas. KH Abdullah Gymnastiar mengembangkan *training* Manajemen Qalbu. Ari Ginanjar mengelola *training* ESQ (*Emotional and Spiritual Qotient*). Segmen yang mereka garap adalah kalangan profesional dan karyawan BUMN. Meneg BUMN Sugiharto beberapa waktu lalu mewajibkan seluruh karyawan BUMN untuk mengikuti *training* ESO, Hasilnya, ternyata, mengejutkan.

Menurut Aries Mufti, staf khusus Meneg BUMN, peserta yang merasa pernah korupsi bisa tergugah kesadarannya. Aries mencontohkan kasus di Makassar, ada seorang profesional yang langsung memberikan kunci rumah dan kunci mobil hasil KKN. Ada juga yang datang mengembalikan korupsinya senilai Rp. 15 milyar.<sup>12</sup> *Training* demikian mampu menggugah kesadaran bahwa pendapat yang diperoleh dengan modus KKN itu tidak membawa berkah dalam kehidupan. Kesadaran yang datang dari dalam jiwa seperti ini akan lebih *genuine* dan bertahan lama ketimbang kesadaran akibat takut dipenjarakan.

Dalam konteks ini, ajaran agama memainkan peran penting. Tentu tergantung bagaimana ajaran agama itu dikemas dan disampaikan. Bila penyampaianannya elegan, bermutu, disesuaikan dengan alam pikiran *audiens* yang kaum profesional, tidak dengan indoktrinasi hitam putih, maka agama bisa menggugah kesadaran orang untuk berbuat lebih baik. Kultur kita tidak hanya mewariskan karakter buruk, tapi juga banyak menyebarkan norma kebaikan dan kearifan tradisional. Aset ini perlu direvitalisasi.<sup>13</sup>

Selain *training*, masih banyak varian lain dalam membangun kesadaran mental anti-korupsi. Misalnya, dengan keteladanan pemimpin, peningkatan jenjang pendidikan, dan sebagainya. Tiga prinsip dari KH Abdullah Gymnastiar, yaitu memulai dari diri sendiri, memulai dari hal kecil, dan memulai sekarang juga, bisa diadopsi sebagai titik awal yang strategis untuk membangun perubahan besar. Proses ini mungkin memang perlu waktu lama. Tapi hasilnya akan lebih murni dan tahan lama ketimbang upaya-upaya instan, karbitan, dan permukaan.

Momentum penegakan hukum dalam memberantas korupsi akhir-akhir ini bisa dimanfaatkan untuk menyuntikkan kesadaran perbaikan mental, perombakan kebiasaan, dan pembaruan budaya, menuju yang lebih baik. Di saat banyak orang mulai ketakutan bertindak korup karena ancaman hukum, maka penyadaran jiwa menemukan momentum kondusif untuk memperkuat rasa takut hukum itu dengan pencerahan jiwa dan spiritual. Kombinasi solusi yudisial dan solusi kultural ini diharapkan dapat berdampak mujarab untuk memberantas korupsi secara tuntas dan total.

### Catatan Kaki

1. Sejarah telah mengajarkan, bahkan VOC pun bangkrut akibat korupsi. Lihat Alwi Shahab, "Korupsi Bangkrutkan VOC" dalam Alwi Shahab, *Robin Hood Betawi*, (Jakarta: Republika, 2002), 44.
2. Pencarian akar kultural korupsi ini pendekatannya sama dengan pencarian akar kultural soal lain. Misalnya, akar kultural *civil society*, seperti tampak dalam buku Azyumadi Azra, dll., *Mencari Akar Kultural Civil Society di Indonesia*, (Jakarta: INCIS, 2003).
3. *Kompas* memuatnya pada edisi 5 Mei 1977. Lalu dibukukan dalam Mochtar Lubis, *Manusia Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001).
4. Lihat Laporan Utama "Bola Liar Skandal Haji", *Majalah GATRA*, edisi 2 Juli 2005.
5. Sarlito Wirawan Sarwono, "Kondisi dan Situasi Manusia Indonesia Masa Kini Dilihat Dari Sudut Psikologi", *Kompas*, 5 Mei 1977.
6. Kini purnawirawan Letnan Jenderal, mantan Danjen Kopasus dan Pangkostrad.
7. Margono Djojohadikusumo, "Feodalisme, New-Feodalisme, dan Aristokrasi", *Kompas*, 13 Mei 1977.
8. Koentjaraningrat, *Rintangan-Rintangan Mental dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Bhratara, 1969); lihat juga Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1990).
9. F.R. Kluckhohn dan F.L. Strodtbeck, *Variation and Value Orientation*, (1961).
10. Ruth Benedict, *The Chrysanthemum and the Sword* (Boston: Houghton Mifflin Company, 1946).
11. F.L.K Hsu, *Suppression Versus Repression*, (1949).
12. Aries Mufti menyampaikannya dalam sidang kelompok "Strategi Kebudayaan Umat Islam Indonesia Bidang Ekonomi" di Kongres Umat Islam Indonesia ke-4, di Hotel Sahid Jakarta, 18 April 2005.
13. <sup>13</sup> Tentang akar kultur positif ini baca Muh. Said, *Etik Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980).

## **Daftar Pustaka**

- Azra, Azyumadi. dkk., *Mencari Akar Kultural Civil Society di Indonesia*, Jakarta: INCIS, 2003.
- Benedict, Ruth. *The Chrysanthemum and the Sword*, Boston: Houghton Mifflin Company, 1946.
- Djojohadikusumo, Margono. “Feodalisme, New-Feodalisme, dan Aristokrasi”, *Kompas*, 13 Mei 1977.
- Kluckhohn, F.R. dan Strodtbeck, F.L. *Variation and Value Orientation*, (1961).
- Koentjaraningrat, *Rintangan-Rintangan Mental dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Bhratara, 1969.
- Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1990.
- Laporan Utama “Bola Liar Skandal Haji”, *Majalah GATRA*, edisi 2 Juli 2005.
- Lubis, Mochtar. *Manusia Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Mufti, Aries. “Strategi Kebudayaan Umat Islam Indonesia Bidang Ekonomi” di Kongres Umat Islam Indonesia ke-4, di Hotel Sahid Jakarta, 18 April 2005.
- Said, Muh. *Etik Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. “Kondisi dan Situasi Manusia Indonesia Masa Kini Dilihat Dari Sudut Psikologi”, *Kompas*, 5 Mei 1977.
- Shahab, Alwi. “Korupsi Bangkrutkan VOC” dalam Alwi Shahab, *Robin Hood Betawi*, Jakarta: Republika, 2002.

ISSN 0215-6253 (print)



9 770215 625008

ISSN 2714-6103 (online)



9 772714 610004